



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG)
UNIT KERJA : BALAI BESAR MKG WILAYAH IV - MAKASSAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRWAN SLAMET
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
3. NHK : 740526

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 5.207.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/100 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, WARISAN Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 1680 m2 di KAB / KOTA BATANG, WARISAN Rp. 505.000.000
3. Tanah Seluas 1795 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, WARISAN Rp. 605.000.000
4. Tanah Seluas 2005 m2 di KAB / KOTA BATANG, WARISAN Rp. 455.000.000
5. Tanah Seluas 1420 m2 di KAB / KOTA BATANG, WARISAN Rp. 405.000.000
6. Tanah Seluas 1666 m2 di KAB / KOTA BATANG, WARISAN Rp. 405.000.000
7. Tanah Seluas 1568 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, WARISAN Rp. 305.000.000
8. Tanah Seluas 1640 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, WARISAN Rp. 305.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/150 m2 di KAB / KOTA BATANG, WARISAN Rp. 605.000.000
10. Tanah Seluas 25 m2 di KAB / KOTA BATANG, WARISAN Rp. 12.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 855.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	36.000.000
1. MOTOR, YAMAHA SE88 Tahun 2021, HASIL SENDIRI	Rp.	18.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SE88 Tahun 2022, HASIL SENDIRI	Rp.	18.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	125.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.025.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	375.000.000
Sub Total	Rp.	6.768.000.000
III. HUTANG	Rp.	25.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.743.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.